

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Fakrulloh, Z., & Wismulyani, E. (2019). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Cempaka Putih PT.
- Fischer, F., dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Publik. Nusamedia.
- Iman Jalaludin Rifa'I Dkk, Metodologi Penelitian Hukum, (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Jumroh., & Pratama, Y. (2021). Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rachmat, K. Teknis Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Saputra, R., & TRisnawati, A. (2024). Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (DIY: Publika Global Media, 2024).

2. Jurnal:

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Ardyati, R., & Sholeha, F. (2022). Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Asas Contrarius Actus. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3.
- Bidari, S. (2020). *Kajian Hukum Pembatalan Suatu Akta Otentik Sebagai Legal Cover Para Pihak Terkait Dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*. Universitas Surakarta.
- Brampu, D. (2023). SKRIPSI. Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
- Djalante, R., & Siregar, N. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Era Digital*. Jurnal Administrasi Publik, 14(2).
- Herlinda, D. (2021). Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 1028 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Jurnal Kemunting, Vol.2 No.1.
- Hidayat, U., dkk. (2020). Pengaruh Prosedur Pelayanan dan Kemampuan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Akta Nikah (Non-Muslim) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
FISIP UNDIP.

Lestari, E. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan*. Universitas Negeri Surabaya.

Madaul, M., dkk. (2025). Implementasi Kebijakan layanan identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Prinsip*, Vol. 1, No. 2

Marfu'ah, S., & dkk. (2024). *Digitalisasi Pelayanan Publik Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 15, No. 2.

Marsudi, & dkk. (2025). *Transformasi Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tangerang*. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 2, No.3.

Putra, R. (2021). *Digitalisasi Arsip Kependudukan dan Efektivitas Layanan Publik*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.

Rahmawati, E., & Suryawati, R. (2021). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*, Vol 1, No. 1.

- Rohmah, D., (2023). *Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan: Manfaat Dan Tantangan Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan*. Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, pp.1336-1346.
- Sari, S., & dkk. (2024). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring (Sobat Dukcapil) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tahun 2023*. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 3, No. 02.
- Susila, A., & Cahyani, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi*. Jurnal AKP, Vol.9, No. 1.
- Susilo, T., & Wahyudi, E. (2022). *Implementation Of Giving Assistance To Defendant People Who Are Not Able In District Court Of Surabaya*. JURNAL LIGAHUKUM, Jilid 2, Hal 134-143.
- Trisna, P., dkk. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng*. E-Journal Komunitas Yustisia Pendidikan Ganesha, Vol. 1, No.2.
- Widianis, K., & Sukraaliawan, I. (2023). *Implementasi Kebijakan Kartu Tanda penduduk (KTP) Digital dalam Mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan: Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng*.

Yudistira, M., dkk. ((2024). Implementasi Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. SAJJANA: Public Administration Review, Vol. 02, No. 01.

3. Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo.

4. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Lain-Lain:

Badriah, S. Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya.

Diakses pada 03 Agustus 2025, dari

https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid=AfmBOoiSwiYtQ0eCxZMypxAI5_gdkDjbxUM7rw_sPdB5tu06IfC0sy9#Pengertian_Implementasi

Dukcapil Purworejo. Diakses pada 03 Agustus 2025, dari

<https://disdukcapil.purworejoksb.go.id/>

Hukum Online. Administrasi Kependudukan. Diakses pada 03 Agustus

2025, dari <https://www.hukumonline.com/kamus/a/administrasi-kependudukan>

JDIH Kementrian Keuangan. Kamus Hukum Definisi Administrasi

Kependudukan. Diakses pada 03 Agustus 2025, dari

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/administrasi-kependudukan?id=01465530207a2b1961271992b85eece4>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Pedoman Pengelolaan Sistem*

Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK). Diakses dari

<https://dukcapil.kemendagri.go.id>.

UIN SUSKA RIAU. BAB II Landasan Teori. Diakses pada 31 Juli 2025,

dari https://repository.uin-suska.ac.id/14491/7/7.%20BAB%20II_2018729ADN.pdf

Universitas Negeri Yogyakarta. BAB II Kajian Teori. Diakses pada 31 Juli

2025, dari <https://eprints.uny.ac.id/1895/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf>

Universitas Medan Area. BAB II Tinjauan Pustaka. Diakses pada 31 Juli

2025, dari https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1339/5/14180103_4_file%205.pdf

Universitas Semarang. BAB II Tinjauan Pustaka. Diakses pada 31 Juli

2025, dari <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2013/A.131.13.0091/A/131/13/0091-05-BAB-II-20180320103428-TINJAUAN-YURIDIS-MENGENAI-PENCATATAN-AKTA-KELAHIRAN-ANAK-LUAR-KAWIN-DI-KECAMATAN-WONOSALAM-KABUPATEN-DEMAK-.pdf>

Wawancara, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, 22 Agustus 2025.

Wikipedia. Akta Kelahiran. Diakses pada 03 Agustus 2025, dari

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akta_kelahiran

Yusuf, M. 15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli. Diakses
pada 03 Agustus 2025, dari
[https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-
publik/?srsltid=AfmBOorJRUGa5uttsQSYCSSC4g6vx_ZMRWD1
H7M-vUUIbjdDv9RXWUy0](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/?srsltid=AfmBOorJRUGa5uttsQSYCSSC4g6vx_ZMRWD1H7M-vUUIbjdDv9RXWUy0)